

DAFTAR PUSTAKA

- Bell, Michael E., John H Bowman. 2002. "Extending The Property Tax Into Previously Untaxed Areas In South Africa." *National Tax Association, Tax Institute of America, Proceedings of the Annual Conference on Taxatio* 2002.
- Babawale, G K. 2013. "Designing Appropriate Valuation Model for Sustainable Property Tax System in Developing Countries." *International Journal of Law and Management*. Vol. 55 Iss 3 pp. 226-246.
- Braun, V., Clarke, V. 2006. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology*, 3(2) Pp 77-101. ISSN 14780887.
- Camp, Robert. 1989. *The Search for Industry Best Practices that Lead to Superior Performance*. Productivity Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fourth Edition. California: Sage Publications, Inc.
- Cahyono, Dwi S. 2011. "Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kabupaten Halmahera Timur)." Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Gie, The Liang. 2009. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Hartono, Jogyanto. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Edisi kelima. Yogyakarta: BPFE.
- Hartini. 2008. "Evaluasi terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten Tahun 2007." Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kadir, R Achmad Kurniawan. 2012. "Implikasi Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo." Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Kabupaten Jembrana, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Kabupaten Jembrana, Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi. Ed XVII. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke-32. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2014. *Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*.
- Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014 Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan* (Buku ke-2 dari 5 buku).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

Republik Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014, Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.

Republik Indonesia, Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Ritonga, Irwan Taufiq. 2010. *Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Lembaga Kajian Manajemen Pemerintahan Daerah (LKMPD).

Standar Akuntansi Pemerintah, Buletin Teknis Nomor 06 Akuntansi Piutang. 2008. Komite Standar Akuntansi Pemerintah.